

ANALISIS PROSEDUR PENAGIHAN BIAYA OPERASIONAL DI PT PLN (PERSERO) UPT PURWOKERTO

Alisia Mandasari^{1*}, S.S Atmadja²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika, Surabaya
email: ¹⁾alisiamandasari@gmail.com, ²⁾atiekatma@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 28 - 06, 2023

Revised : 07 - 07, 2023

Accepted : 28 - 07, 2023

Keywords:

Billing Procedures;
Operating Costs;
Procurement of Goods.

ABSTRACT

Direct procurement is the implementation of the procurement of goods or services carried out by purchasing or paying directly to the provider of goods or services by procurement officials without an auction process. CV Cortheo is one of the direct procurement vendors at PT PLN (Persero) UPT Purwokerto. After the work is completed, the vendor bills for operational costs after the work period ends. When billing the documents prepared take a relatively long time with relatively many documents, this is due to the large number of parties involved in the billing administration process, therefore it is necessary to centralize payments called the Vendor Invoicing Portal (VIP) to simplify the billing process in one door. This research method uses a qualitative descriptive method with a case study approach that occurs within the company, which is carried out systematically to collect, process and conclude existing data. The purpose of this study was to determine the operational cost billing procedure at PT PLN (Persero) UPT Purwokerto. The results of this study indicate that the old system billing process takes a long time, while the centralization of payments called the Vendor Invoicing Portal (VIP) makes the billing process more transparent, structured effective and efficient for vendors.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



*Corresponding Author:

Alisia Mandasari
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika, Surabaya
Email: alisiamandasari@gmail.com

1. PENDAHULUAN

CV Cortheo merupakan salah satu perusahaan yang menjadi mitra kerja PT PLN (Persero). CV Cortheo merupakan perusahaan yang dipilih PT PLN (Persero) UPT Purwokerto melalui Pengadaan Langsung (PL) untuk proyek pengukuran kemiringan tower. Pengadaan Langsung (PL) merupakan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan dengan cara membeli atau membayar langsung kepada penyedia barang atau jasa oleh pejabat pengadaan tanpa proses lelang atau seleksi. Keberhasilan suatu perusahaan dapat dicapai dengan melakukan kerjasama dengan pihak tertentu. Tujuannya yaitu untuk membantu aktivitas dalam suatu perusahaan dengan adanya kerjasama suatu perusahaan bisa berkembang dengan cepat. Banyak manfaat yang diperoleh dari setiap perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan mitra kerjanya.

Setiap proyek yang diberikan oleh PT PLN (Persero) pada CV Cortheo, CV Cortheo akan melakukan pengalihan kepada PT PLN (Persero) atas biaya operasional, jasa maupun material yang terpakai saat proyek berlangsung sesuai dengan Surat Perintah Pekerjaan Jasa (SPKPJ). Pada surat perintah kerja tertulis dokumen dokumen yang harus disiapkan pada saat akan melakukan penagihan, untuk mempersiapkannya membutuhkan

waktu yang cukup lama agar semua dokumen tersebut lengkap dan bisa langsung diserahkan pada PT PLN (Persero).

Dalam penelitian ini dapat diamati bagaimana prosedur penagihan pekerjaan pada PT PLN (Persero) UPT Purwokerto, hambatan atau permasalahan yang dihadapi pada saat prosedur penagihan biaya operasional di PT PLN (Persero) UPT Purwokerto.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alur dan prosedur penagihan Biaya Operasional di PT PLN (Persero) UPT Purwokerto beserta dokumen yang diperlukan untuk proses penagihan dan juga cara mengatasi hambatan yang terjadi pada saat penagihan agar proses penagihan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Prosedur Penagihan

Penagihan merupakan suatu kegiatan menagih kepada seseorang atau kelompok, agar orang tersebut ingat akan kewajiban yang harus dibayar menurut (Muhammad & Rosanti, 2022). Berdasarkan pemaparan tersebut menjelaskan penagihan adalah suatu sikap untuk memberitahukan seseorang untuk mengingatkan bahwa yang bersangkutan masih memiliki suatu kewajiban yang harus dibayarkan (Bustami, 2006; Kusandi, 2019; Mardiasmo, 1987). Penagihan ini bertujuan untuk mengingatkan kepada mereka yang memiliki hutang atau kewajiban kepada perusahaan untuk segera dilakukan pelunasan. (Arikunto, 2006; Indriyanto & Supomo, 2012; Poerwandari, 1998; Romney & Steinbart, 2015) Penagihan ini harus dilakukan karena perusahaan harus melakukan perputaran dana dengan efektif dan efisien (Agustin, 2019), sehingga piutang wajib untuk ditagihkan (Baridwan, 2009).

Dalam penagihan ini, terdapat prosedur yang harus dilakukan agar dapat mengingatkan seseorang terkait kewajibannya. Prosedur yang harus dilakukan yaitu :

1. Menyiapkan semua dokumen dan laporan terkait piutang yang dimiliki oleh perusahaan atau perorangan tertentu. Dokumen dan laporan terkait piutang
2. Melakukan *Contact by Phone* yang menjelaskan bahwa saat ini yang bersangkutan masih memiliki kewajiban yang harus dibayar
3. Melakukan konfirmasi dan melakukan pertemuan sesuai perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya
4. Dari pihak *user* terutang ini harus melakukan pembayaran terlebih dahulu sesuai dengan surat perjanjian
5. Dari pihak vendor akan mengembalikan jaminan yang dijamin oleh *user* terutang dan membuat surat yang menjelaskan bahwa saat ini pihak *user* terutang telah membayarkan hutang, sehingga hutang yang dimiliki kepada pihak vendor telah lunas .

Berdasarkan prosedur penagihan tersebut dapat disimpulkan bahwa penagihan harus berfokus untuk mengingatkan pihak *user* terutang secara berkala atau terus menerus agar pihak *user* dapat terus mengingat hutang yang dimiliki dan merasa bahwa hutang yang dimiliki harus wajib dibayar.

2.2. Biaya Operasional

Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari sebuah perusahaan (Zamzami, 2022). Biaya operasional mencakup hal-hal seperti penggajian, komisi penjualan, tunjangan karyawan dan kontribusi pensiun, transportasi dan perjalanan, amortisasi dan depresiasi, sewa, perbaikan, hingga pajak. Pencatatan biaya operasional harus dilakukan secara rutin oleh perusahaan, juga biaya-biaya yang tidak berkaitan secara langsung dengan kegiatan operasional, atau biasa juga disebut biaya non-operasional dengan mencatatkan kedua jenis pengeluaran tersebut, akuntan perusahaan dapat menentukan bagaimana biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan bagi perusahaan (Rudianto & Akuntansi, 2009; Sugiri & Riyono, 2009). Fungsi lain dari pencatatan biaya operasional adalah untuk melihat masa depan perusahaan, apakah bisnisnya masih dapat berjalan lancar atau tidak.

Menurut (Supriyono, 2011) Biaya Operasional adalah biaya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan modal kerja. Pengertian dari biaya operasional itu sendiri adalah semua biaya yang menunjang penyelenggaraan pelayanan jasa atau semua biaya yang dapat didefinisikan mempunyai hubungan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa. Biaya operasional suatu perusahaan dikategorikan dari dua komponen pembiayaan besar, yaitu:

1. Biaya Tetap (*Fixed Cost*).

Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meski ada peningkatan dalam penjualan dan produktivitas. Biaya ini harus selalu dibayarkan, tanpa memperhatikan aktivitas dan performa perusahaan. Ini termasuk pembayaran sewa, gaji untuk karyawan, non-produksi, hingga asuransi.

2. Biaya Variabel

Biaya variabel terdiri dari biaya-biaya yang tidak tetap (*non fixed cost*), tergantung pada aktivitas produksi yang dilakukan. Tidak seperti biaya tetap yang tidak berubah dan tidak dapat dipengaruhi oleh biaya lain, biaya variabel akan naik seiring dengan meningkatkan produksi. Jika produksi mengalami penurunan, maka biaya variabel juga ikut turun. Contohnya termasuk bahan baku dan biaya pengiriman.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, menurut (Indriyanto & Supomo, 2012) penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian terhadap masalah masalah berupa fakta saat ini dari suatu populasi. Data yang dikumpulkan dari penelitian deskriptif ini berupa kata kata bukan angka. (Mulyadi, 2013)

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi, wawancara, catatan lapangan, gambar foto, rekaman video, dan lain sebagainya menurut (Poerwandari, 1998).

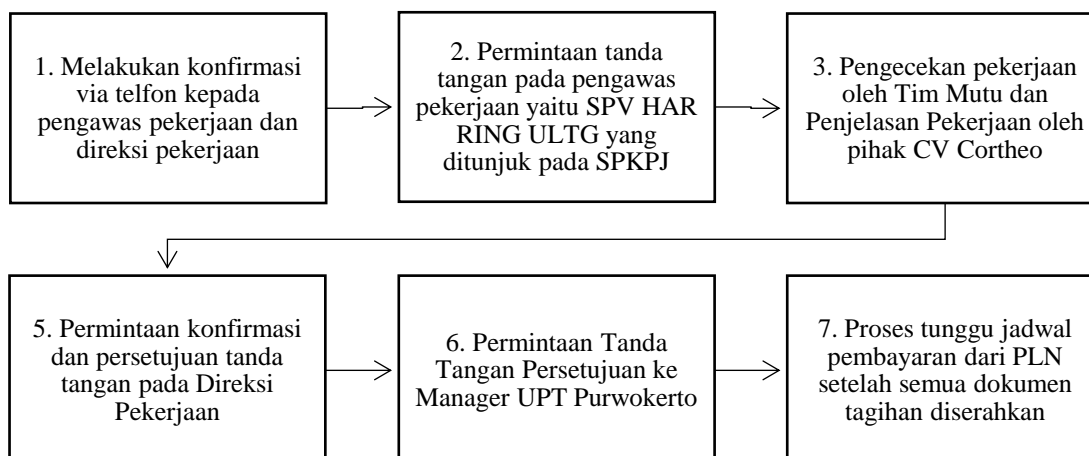
Pada penelitian ini penulis melakukan sesi wawancara tanya jawab terhadap narasumber bagian AR (*Account Receivable*) dan pihak terkait yang mengetahui terkait penagihan dengan data yang sudah disediakan untuk penulisan. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus peneliti melakukan observasi langsung yang terjadi dalam perusahaan yang dilakukan dengan mengamati kondisi saat melakukan penagihan kepada pelanggan.

Dokumentasi merupakan metode mengumpulkan sebuah data yang dihasilkan dengan cara menyediakan dokumen yang diperlukan untuk dipergunakan melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil dari observasi yang diolah dan disimpulkan dengan sebuah data yang ada. Penelitian ini menggunakan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data karena penelitian ini dilengkapi dengan data dari hasil kegiatan pekerjaan berupa :

1. Foto dokumentasi pekerjaan
2. Laporan progress pekerjaan
3. Laporan hasil pekerjaan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

CV Cortheo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan teknologi informasi, mekanikal dan elektrikal *networking* dan kontraktor. CV Cortheo merupakan salah satu perusahaan yang ditunjuk langsung oleh PT PLN (Persero) UPT Purwokerto untuk pekerjaan pengukuran kemiringan tower. Pada saat pekerjaan selesai, CV Cortheo akan melakukan penagihan untuk biaya operasional, yang digunakan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Prosedur penagihan biaya operasional kepada PT PLN (Persero) harus berfokus kepada pemberkasan yang baik dan benar. Dalam menyiapkan dokumen transaksi ini akan dilampirkan Ketika penagihan berlangsung. Dokumen yang harus terlampir tersebut diantaranya : Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan, Surat Permohonan Pembayaran, Invoice, Kwitansi, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP), Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan (BASP), Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa (BAST), Berita Acara Pembayaran (BAP), Laporan Kemajuan Pekerjaan Harian, Mingguan, Bulanan (LKP), Kurva S, Laporan Akhir Pekerjaan Tower, Laporan Dokumentasi Pekerjaan, copy NPWP, copy PKP, Faktur Pajak, copy SPKPJ, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Integrity Due Diligence (IDD), Contractor Safety Management System (CSMS), Surat Referensi Bank dan untuk internal perusahaan Berita Acara Serah Terima Dokumen (BASTD). Pada saat penyerahan dokumen penagihan, terdapat tahapan – tahapan pada saat penyerahan dokumen penagihan harus secara langsung di kantor PT PLN (Persero) UPT Purwokerto sebagai berikut :



Berikut penjelasan dari alur diatas:

1. Melakukan konfirmasi via telfon kepada pihak yang di tunjuk dalam spk sebagai pengawas dan direksi pekerjaan untuk persetujuan jika pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100%
2. Jika sudah melakukan konfirmasi dan pertemuan perjanjian untuk melakukan tanda tangan jika pekerjaan telah selesai 100%. Pihak CV Cortheo menemui pihak PLN UPT Purwokerto yaitu :
- SPV HAR RING ULTG yang ditunjuk pada SPKPJ yang bertugas sebagai Pengawas Pekerjaan untuk meminta tanda tangan pada Laporan Pekerjaan Harian (LKP Harian), Berita Acara.
3. Jika pengawas pekerjaan telah melakukan tanda tangan untuk memastikan pekerjaan telah diselesaikan . Setelah itu konfirmasi pada Tim Mutu yang telah ditunjuk pada SPKPJ untuk melakukan cek pekerjaan dan penemuan anomali ,tindak lanjut serta memastikan jika semuanya telah dikerjakan dengan baik dan benar pada saat itu juga. Pihak vendor CV Cortheo menjelaskan pekerjaan dan kendala yang ada dilapangan saat pekerjaan berlangsung dan juga hasil dari pekerjaan tersebut. Pada tahap ini Tim Mutu akan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP).
4. Setelah pengecekan dari Tim Mutu PT PLN (Persero) UPT Purwokerto selanjutnya, menyerahkan dokumen kelengkapan penagihan kepada bagian administrasi konstruksi PT PLN (Persero) UPT Purwokerto beserta dokumen yang sudah di tanda tangan oleh SPV HAR RING ULTG dan Tim Mutu .
5. Setelah dokumen diserahkan ke bagian administrasi selanjutnya akan diberikan kepada Direksi pekerjaan untuk permintaan tanda tangan yang menyatakan bahwa pekerjaan benar benar telah selesai 100% dan dokumen telah lengkap sesuai yang sudah tertuang pada SPKPJ. Pada tahap ini Direksi pekerjaan akan menandatangani Laporan Pekerjaan Mingguan dan Bulanan (LKP Mingguan dan Bulanan)
6. Setelah itu permintaan tanda tangan ke Manager UPT Purwokerto, menandatangani dokumen diantaranya : Berita Acara Selesai nya Pekerjaan (BASP), Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa (BAST), Berita Acara Pembayaran (BAP).
7. Jika semua dokumen telah di tanda tangan dan telah lengkap semua maka pihak CV Cortheo menunggu proses pembayaran yang akan dilakukan oleh pihak PT PLN (Persero) UPT Purwokerto. Estimasi pembayaran sekitar 2-3 Minggu setelah semua dokumen diserahkan pada bagian keuangan.

Hambatan atau masalah dalam prosedur penagihan.

Setelah melakukan penelitian, penulis menemukan hambatan dan masalah Ketika menjalani prosedur penagihan. Hambatan atau maslaah tersebut yaitu ketika meminta konfirmasi untuk tanda tangan oleh pengawas pekerjaan, dan tim mutu pekerjaan dari PT PLN (Persero) UPT Purwokerto harus menentukan jadwal dengan pengawas pekerjaan serta tim mutu untuk penandatanganan dokumen dan pengecekan pekerjaan dan itu menjadi permasalahan jika adanya pergantian waktu untuk pertemuan dan meminta tanda tangan, hal tersebut bisa mengulur jadwal waktu untuk proses penagihan dan pembayaran. Serta untuk proses jadwal tunggu pembayaran tagihan tidak transparan antara pihak PT PLN (Persero) dengan Vendor, Vendor tidak bisa di monitoring status pembayaran sudah sampai pada tahap mana dan berapa lama lagi waktu dan proses yang diperlukan oleh pihak PT PLN (Persero) untuk membayar tagihan yang sudah diserahkan.

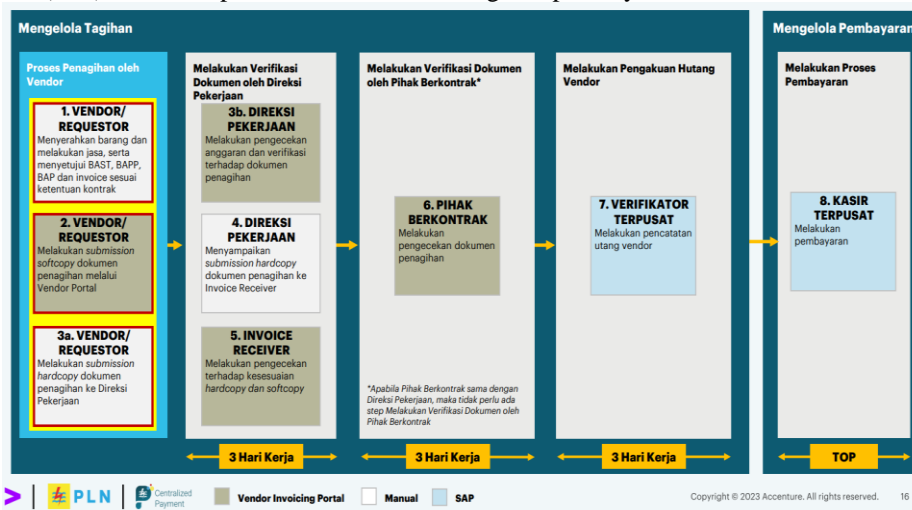
Cara Mengatasi Masalah

Setelah diketahui penyebab dari hambatan pada prosedur penagihan, berikut cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya yaitu pada saat selesai mempersiapkan dokumen yang digunakan untuk penagihan dan bisa di scan untuk di upload pada VIP(Vendor Invoicing Portal). Pada sistem Vendor Invoicing

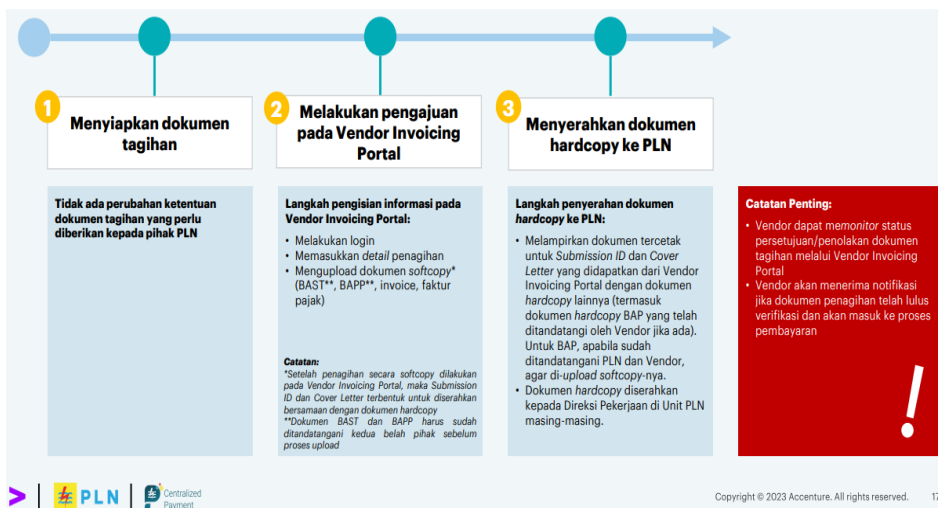
Portal (VIP) ini merupakan sebuah sistem dari PT PLN (Persero) yang baru di implementasikan untuk vendor terkait upaya transformasi PLN dalam melakukan standarisasi, digitalisasi, dan peningkatan proses penagihan serta pembayaran agar lebih cepat, efektif, efisien dan optimal. Dengan sistem VIP ini banyak manfaat yang bisa diperoleh salah satunya yaitu :

1. Visibilitas, realibilitas dan control
2. Optimasi Working Capital
3. Transparansi dan Kepuasan Mitra PLN
4. Efisiensi dan Efektifitas

Pada Tahapan alur proses penagihan pembaruan dari PT PLN (Persero) menggunakan sistem Vendor Invoicing Portal (VIP) berikut implementasi sentralisasi tagihan pembayaran.



Alur Proses Pengajuan Tagihan Pada PLN dengan menggunakan Vendor Invoicing Portal yaitu:



Jadi pada implementasi hasil roll out sentralisasi pembayaran maka mitra kerja PLN sangat terbantu untuk memonitoring proses dan tahapan alur untuk penagihan pada PLN . Vendor Invoicing Portal merupakan sarana pelayanan terpadu satu pintu untuk melakukan pengunggahan dokumen penagihan dan pembayaran dalam bentuk softcopy, serta melakukan monitoring status penyerahan dan verifikasi dokumen.

5. KESIMPULAN

Dalam Prosedur Penagihan Biaya Operasional, PT PLN (Persero) mempersyaratkan banyak dokumen serta tahapan konfirmasi dan penanda tangan dokumen untuk proses penagihan, dan hal tersebut cukup menyulitkan bagi vendor. Persyaratan dalam prosedur penagihan biaya operasional pada CV Cortheo ke PT PLN (Persero) UPT Purwokerto yaitu terdiri dari beberapa dokumen diantaranya :

Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan, Surat Permohonan Pembayaran, Invoice, Kwitansi, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP), Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan (BASP), Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa (BAST), Berita Acara Pembayaran (BAP), Laporan Kemajuan Pekerjaan, Harian, Mingguan, Bulanan (LKP), Kurva S, Laporan Akhir Pekerjaan Tower, Laporan Dokumentasi Pekerjaan, copy NPWP, copy PKP, Faktur Pajak, copy SPKPJ, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Integrity Due Diligence (IDD), Contractor Safety Management System (CSMS), Surat Referensi Bank dan untuk internal perusahaan Berita Acara Serah Terima Dokumen (BASTD).

Namun saat ini implementasi untuk penagihan biaya pada PT PLN (Persero) menjadi lebih mudah, transparan dan bisa di monitoring oleh vendor untuk tahapan prosesnya. Jadi dengan sistem Vendor Invoicing Portal, vendor bisa melakukan upload dokumen pembayaran dalam bentuk softcopy setelah itu hardcopy bisa diserahkan ke pihak PT PLN (Persero) setelah itu vendor bisa memonitoring status penyerahan dan verifikasi dokumen penagihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A. (2019). Analisis Pengendalian Piutang Terhadap Penagihan Piutang Arus Kas Pt. Cowell Development Tbk. *Jurnal Bina Akuntansi*, 6(2), 42–65.
- Arikunto, S. (2006). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. In *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Baridwan, Z. (2009). Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode Edisi Kelima. *Yogyakarta. BPFE*.
- Bustami, N. (2006). Akuntansi Biaya Tingkat Lanjut kajian teori dan aplikasi. *Yogyakarta: Graha Ilmu*.
- Indriyanto, N., & Supomo. (2012). *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE AKAPI.
- Kusandi, I. H. (2019). Analisis Prosedur Terjadinya Piutang Pada PT. Pertani (Persero) Unit Pemasaran Subang. *The World of Financial Administration Journal*, 136–162.
- Mardiasmo, D. (1987). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*.
- Muhammad, A., & Rosanti, R. (2022). Prosedur Penagihan Biaya Operasional Pada PT Tracon Industri Kepada PT Pertamina EP Regional 2 Zona 7 Field Subang. *The World of Financial Administration Journal*.
- Mulyadi. (2013). Sistem Akuntansi Keuangan. Edisi ketiga, Cetakan Keempat. *Salemba Empat, Jakarta*.
- Poerwandari, E. K. (1998). Pendekatan kualitatif dalam penelitian psikologi. *Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia*, 2.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2015). Sistem informasi akuntansi. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Rudianto, P. A., & Akuntansi, P. (2009). Konsep dan teknik penyusunan laporan Keuangan. *Erlangga, Jakarta*.
- Sugiri, S., & Riyono, B. A. (2009). Akuntansi Suatu Pengantar 2. *Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP. STIM YKPN*.
- Supriyono, R. A. (2011). Akuntansi Biaya: pengumpulan biaya dan penentuan harga pokok. *Cetakan Kelima Belas. BPFE, Yogyakarta*.
- Zamzami, R. M. (2022). The Effect Of Third Party Funds, Non-Performing Financing And Operating Expenses Of Operating Income On Financial Performance:(Empirical Study Of Sharia Commercial Banks For The Period 2016-2020). *CASHFLOW: Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide* ANCE AND ECONOMIC WORLDWIDE, 1(4), 183–198.